

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah yang baik harus didasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada stakeholder. *Governmental accounting standart bord* (1998) dalam konsep statement nomor 1 tentang objective finansial reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keungan di pemerintah yang di dasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Bentuk kongkrit untuk mewujudkan tranparasi akuntabiilitias keuangan Negara adalah dengan dikeluarkannya pada UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai standart akuntansi pemerintah SAP yang telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah PP No.71 Tahun 2010 menyatakan

bahwa lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi standart akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dan standartakuntansi pemerintah SAP berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual entitas pelaporan diharapkan segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Menurut Sumarlin (2004) bahwa semakin dengan besarnya dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit organisasi pemerintah dan negara dalam merealisasi tujuan atau progam secara efektif, efisien dan ekonomis. Good governece telah lama dirancang untuk mewujudkan instrumen peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keungan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Yaitu informasi yang mempunyai nilai dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah di lakukan. Penelitian zetra (2009) yang dilakukan di 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disumatera barat pada tahun 2008 dan 2009 ditemukan bahwa masih sulit bagi peraturan di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara akuntabel, tepat waktu dan disusun mengikuti standart daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya staf yg memiliki keahlian alam melaksanakan pertanggung jawaban anggaran, khususnya keahlian dibidang akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh BPK (2009) nazier (2009) yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer baik hardware maupun software baik paraturan di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk memenuhi semua urusan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal sehingga hal tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan, diantaranya oleh Yudianto dan Erawati (2012). Sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi. Namun penelitian Reni (2013) menemukan bahwa hasil sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah.

Hasil penelitian Darwanis dan Mahyani (2009), Primayana Atmaja,

dan Darmawan (2014), Setiawati dan Sari (2014), Megayanti Adiputra dan Sinarwati (2015) yang memberikan bukti bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi menurut penelitian dari Theobora dkk (2017) menyebutkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah. SDM (sumber daya manusia) pada SKPD, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang berlatar belakang akuntansi. Hal ini menjadi kendala bagi pihak aparatur daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (standar akuntansi pemerintahan) (Eriva et.al, 2013).

Dalam peraturan pemerintahan No.58 Tahun 2005 pasal 4 ayat 1 menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di hipotesiskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Namun penelitian dari Gyshella dkk (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado. Jika sistem akuntansi keuangan daerah kota manado telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan

dilaporkan secara periodik dijalankan dengan maksimal, serta dibekali dengan pengetahuan akuntansi yang mumpuni maka akan tercipta kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi sangat memengaruhi terhadap penyusunan laporan keuangan. Seperti diketahui bahwa total volume APBN/D (anggaran pendapatan belanja negara/daerah) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatanyang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto 2002).

Namun menurut penelitian dari Theobora, dkk (2017) berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah . Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian dimana tingkat signifikan sebesar $0,065 > 0,05$. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Pujiswara (2014), Sinarwati (2014), dan Trisaputra (2013) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah . Pemanfaatan teknologi informasi

yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya bisa lebih tepat waktu.

Dalam tingkat efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah diukur berdasarkan 5 kategori yang ditetapkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa pengendalian intern sebagaimana dimaksudkan pada Ayat 2 sekurang-kurangnya memenuhi lima kriteria sebagai berikut. Terciptanya lingkungan pengendalian intern yang sehat, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggarakannya kegiatan pemantauan. Berdasarkan aturan tersebut, maka penerapan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tanggungjawab manajemen yang akan berdampak baik/buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan Permendagri No.4 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) saja, tapi juga dari pengendalian internnya.

Dari perbedaan beberapa penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan System Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan System Akuntansi Keuangan Daerah, Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan”. Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah kota Semarang karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pemerintah kota Semarang dan pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik. Akuntabilitas sangat memiliki arti yang sangat luas, disini akuntabilitas memiliki arti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban penuh serta menerangkan kinerja dan juga tindakan seseorang. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan PSAK dan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berpengaruh besar terhadap

penyusunan laporan keuangan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.

Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem akuntansi keuangan daerah, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Selamet,2011).

Dalam penjelasan peraturan pemerintah daerah No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Wardani & Andriyani,2017).

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang diatas bahwa masih banyak fenomena terhadap masalah nilai pelaporan dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, maka dapat diketahui adanya masalah dalam penelitian ini antara lain : pertama, masih banyaknya kelemahan dalam nilai informasi pelaporan keuangan. Kedua, adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) dari penelitian terdahulu.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga

menimbulkan research gap atau perbedaan maka perlu adanya penelitian kembali pada periode ini. Dengan masalah yang muncul tersebut maka menghasilkan rumusan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi daerah ?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah.
2. Untuk Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah.
3. Untuk Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah.
4. Untuk Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan diatas, maka ada beberapa kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna untuk mendukung teori yan sudah ada dan sekiranya dapat memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu akuntansi sektor publik.

b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti :

1. Penulis/peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkat pemahaman mengenai akuntansi sector public khususnya tentang system pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, penerapaaan system akuntansi daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuanangan pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah/kota

Diharapkan penelitian ini dapat memeberikan informasi kepada pihak pemerintah daerah/kota dalam mengevaluasi bagaimana nilai infrmasi pelaporan keuanga pemerintah daerah/kota saat ini dan hasil penelitian merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dala rangka menciptakan

dan memepertahankan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah secara baik dan benar.

